

**POLEMIK KONSEP ISLAM NUSANTARA:
WACANA KEAGAMAAN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019**

Fridiyanto
FITK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: fridiyantofridiyanto@yahoo.com

Abstrak

Polemik konsep Islam Nusantara tidak dapat dipisahkan dari peristiwa politik di Indonesia yang mencerminkan bangkitnya kelompok Islam Konservatif. Nahdlatul Ulama diasumsikan sebagai organisasi Islam yang mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu konsep polemik Islam Nusantara tidak hanya menjadi wacana pemikiran agama tetapi juga gerakan politik untuk kritik rejim Joko Widodo terutama dalam aspek agama yang dirancang oleh Islam konservatif yang menentang. Polemik konsep Islam Nusantara dikapitalisasi menjadi propaganda politik untuk momentum politik dalam Pemilihan Presiden pada 2019.

Kata Kunci: *Polemik, Islam Nusantara, Pemilihan Presiden 2019*

A. Pendahuluan

Konsep Islam Nusantara mulai dikenal publik Indonesia ketika gagasan ini menjadi tema Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 yang diselenggarakan di Jombang, Jawa Timur pada 1-5 Agustus 2015. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, tema Islam Nusantara langsung mendapat sorotan di kalangan peneliti Islam dan masyarakat umum. Namun di tengah gelombang informasi di era internet, berdampak kepada diskursus Islam Nusantara yang menjadi perdebatan liar dan bahkan menuju anarkisme dan konflik horizontal.

Secara akademis, konsep Islam Nusantara memunculkan gairah perdebatan akademis dan memperkaya khasanah pengkajian Islam di Indonesia. Sebaliknya di kalangan masyarakat Islam Indonesia, konsep Islam Nusantara justru menimbulkan kekawatiran akan munculnya paham-paham keagamaan baru. Diskursus Islam Nusantara juga semakin mempertegas masyarakat Indonesia yang terbelah pasca pemilihan presiden 2014. Polemik konsep Islam Nusantara pun mulai menampakkan politisasi wacana akademik keagamaan menjadi isu politik yang memasuki tahun politik 2018 hingga menjelang pemilihan presiden tahun 2019.

Polemik konsep Islam Nusantara yang digagas oleh Nahdlatul Ulama tidak bisa terlepas dari peristiwa-peristiwa politik internasional dan politik Indonesia khususnya. Konsep Islam Nusantara muncul di tengah-tengah dunia internasional sedang dilanda terorisme yang mengatasnamakan agama, khususnya Islam seperti yang dilakukan oleh Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS). Sedangkan di level politik nasional, momen pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang dimenangkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, secara akademik telah memunculkan kembali teori Kebangkitan Islam Politik yang diperjuangkan kelompok Islam Konservatif dalam Aksi Bela Islam yang dilakukan berjilid-jilid dikarenakan calon petahana, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dianggap telah menista agama dalam pernyataannya soal Surat Al-Maidah; 51.

Banyak kajian ilmiah mengenai Islam Nusantara telah dipublikasi. Namun belum ada yang melihat dan mengkaji bahwa polemik Islam Nusantara tidak terlepas dari relasi kekuasaan dan politik kekuasaan yang sedang diperjuangkan

berbagai kelompok kepentingan. Dalam studi wacana kritis, tidak ada wacana yang netral, pasti selalu terdapat kepentingan dan kekuasaan dibalik wacana, termasuk konsep Islam Nusantara dengan segala polemik yang menyertainya.

Artikel ini fokus mengulas fenomena polemik konsep Islam Nusantara di tengah panggung kontestasi elit politik, khususnya agenda pemilihan presiden Indonesia tahun 2019, fenomena yang diamati dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018, yang dikenal sebagai tahun politik.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah fenomenologi. Peneliti mengamati fenomena wacana keagamaan, khususnya wacana Islam Nusantara mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang tidak terlepas dari peristiwa politik. Sumber data yang digunakan yaitu pemberitaan di media massa cetak dan media *online* yang merekam peristiwa polemik Islam Nusantara dan relasinya dengan momen politik pemilihan presiden di tahun 2019. Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang berkenaan dengan topik artikel serta juga melakukan observasi.

C. Nahdlatul Ulama dan Islam Nusantara

Walaupun tidak berlabel “Islam Nusantara”, wacana Islam Nusantara jika dirunut bisa dimulai dari masa Wali Songo.¹ Berikutnya wacana-wacana mengenai Islam Nusantara muncul dalam berbagai pelabelan, seperti: Hasbi Ash-Shiddiqie di tahun 1961 memunculkan “Fikih Indonesia”; KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) era tahun 80-an memantik polemik dengan artikel “Pribumisasi Islam.”² Akhmad Sahal³ menjelaskan bahwa gagasan, “Fikih Indonesia” dan “Pribumisasi Islam” intinya adalah mengenai pentingnya *urf* dan kebutuhan lokal sebagai pertimbangan penetapan hukum Islam.

¹Ahmad Baso, *Islam Nusantara* (Jakarta, 2015); 2) Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo* (Jakarta, IMan dan Lesbumi PBNU, 2018).

²Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam* (Jakarta: P3M).

³Prolog: Kenapa Islam Nusantara?, dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (Ed), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: Mizan, 2016), hal. 1.

Cendekiawan Muslim, Nurcholish Madjid⁴ dalam buku antologi Festival Istiqlal juga sempat menyinggung relasi agama dan budaya dalam artikel, “Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran: serta tantangan dan harapannya di Indonesia.” Nurcholish Madjid menyadari diperlukannya kekayaan tradisi sekaligus juga membuat inovasi. Dalam konteks Indonesia adalah ‘ruang’ Indonesia yang berada dalam ‘waktu’ zaman modern. Namun artikel Nurcholish Madjid ini tidak memancing perdebatan akademis, gagasan Nurcholish Madjid yang menjadi polemik yaitu mengenai sekularisasi.

Setelah diskursus Fikih Indonesia dan Pribumisasi Islam, polemik mengenai relasi Islam dan budaya ini terhenti cukup lama, hingga kemudian memanas kembali ketika Mukhtar Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 dengan tema “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”⁵ Presiden Joko Widodo sangat merespon positif tema besar Mukhtar NU, Islam Nusantara.⁶ Pandangan dan sikap moderat dan kebangsaan NU tentunya sangat dibutuhkan Pemerintah sehingga Presiden Joko Widodo tentu berkepentingan untuk mendukung program-program Nahdlatul Ulama.

KH. Said Aqil Siraj menjelaskan tema Islam Nusantara mencerminkan bahwa Islam bukan hanya soal akhlak dan syariat saja, tetapi juga mengenai ilmu pengetahuan dan peradaban. Namun menurut KH. Said Aqil Siraj, fenomena dunia Islam saat ini sedang “dibakar” kebencian dan permusuhan.⁷ Karena itu, tema Islam Nusantara akan menjadi promosi kedamaian yang akan disampaikan dari Indonesia untuk dunia.

Dalam waktu hampir bersamaan, organisasi Islam, Muhammadiyah juga melakukan muktamar di Makassar pada tanggal 3-7 Agustus 2015 dengan

⁴Nurcholish Madjid, Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran: serta tantangan dan harapannya di Indonesia” dalam Yustiono, dkk, *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1993), hal. 174 dan 177.

⁵“Ini Tema Mukhtar NU ke-33 di Jombang” www.nu.or.id, Senin 09 Maret 2015, diakses tanggal 05 Agustus 2018.

⁶“Presiden Jokowi Apresiasi Tema Mukhtar ke-33 NU ‘Islam Nusantara’”, <https://m.detik.com>, 01 Agustus 2015, diakses tanggal 05 Agustus 2018.

⁷“Ini Tema Mukhtar NU ke-33 di Jombang” www.nu.or.id, Senin 09 Maret 2015, diakses tanggal 05 Agustus 2018.

mengusung tema “Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan.”⁸ Tema Muktamar Muhammadiyah ini kemudian menjadi label Muhammadiyah sebagai, Islam Berkemajuan. Waktu Muktamar yang berdekatan ini menjadi peristiwa unik, sehingga di media sosial dan media *online* sering muncul pemaduan dua tema organisasi Islam ini ditulis dengan, “Islam Nusantara Berkemajuan.”

Ketika Islam Nusantara menjadi tema Muktamar NU di tahun 2015, polemik tidak sekeras seperti yang terjadi di tahun 2018, bahkan dua tema yang diusung NU dan Muhammadiyah ini banyak mendapat respon positif. Hal unik dari fenomena ini adalah, publik nampaknya hanya merasa perlu memperdebatkan gagasan Islam Nusantara konsepsi NU, namun tidak ada yang mempersoalkan konsep Islam Berkemajuan yang disampaikan oleh Muhammadiyah.

KH. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa Islam Nusantara merupakan sebuah *ijtihad* yang selama ini dipraktekkan oleh NU ketika menghadapi masalah namun tidak ada dalam teks. Islam Nusantara berupaya mengkaji hukum yang disepakati kalangan *nahdliyin*. Menurut KH. Ma’ruf Amin hasil dari proses *istinbath al-hukm* harus dibaca lagi dari perspektif Al-Qur’an dan Sunah.⁹ KH. Ma’ruf Amin menguraikan bahwa terdapat tiga pilar Islam Nusantara: Pemikiran (*fikrah*), gerakan (*harakah*), dan tindakan nyata (*amaliyah*). Dalam pilar *fikrah*, Islam Nusantara merupakan sebuah cara berpikir moderat, Islam Nusantara berada dalam posisi yang tidak tekstualis namun juga tidak liberal. Pada pilar *harakah*, bahwa Islam Nusantara terus berupaya melakukan perbaikan terus menerus dan dengan inovasi. Sedangkan pada pilar *amaliyah*, bahwa Islam Nusantara, segala yang dilakukan kalangan *nahdliyin* tidak memberangus ‘urf selama tidak berlawanan dengan syari’at.

Katib Syariah PBNU, KH. Afifuddin Muhajir menjelaskan bahwa Islam Nusantara tidak lain adalah pemahaman, pengamalan, dan penerapan Islam dalam segmen fikih *mua’amalah* sebagai hasil dialektika antara *nash*, syari’at, ‘urf,

⁸“MUKtamar MUhammadiah Dorong Islam Berkemajuan” Republika.co.id, 27 Juli 2015, diakses tanggal 05 Agustus 2018.

⁹Ma’ruf Amin, “Khitah Islam Nusantara”, Kompas, 29 Agustus 2015.

budaya, dan realita di bumi Nusantara.¹⁰ Menurut KH. Afifuddin Muhajir, konsep Islam Nusantara sama sekali tidak ada sentimen kebencian terhadap Arab, khususnya Arab Saudi. KH. Afifuddin Muhajir mengibaratkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) tentu sama sekali tidak bermaksud bahwa selain mereka bukan pembela Islam.

Islam Nusantara bukan untuk mengubah doktrin Islam, melainkan mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dalam konteks budaya masyarakat yang beragam. Upaya itu dalam usul fikih disebut *tahqiq al-manath*, dalam praktiknya bisa berbentuk *mashlahah mursalah*, *istihsan* dan *'urf*.¹¹ Islam Nusantara adalah cara bermazhab secara *qauli* dan *manhaji* dalam ber-*istinbath* tentang Islam dari dalil-dalilnya yang disesuaikan dengan teritori, wilayah, kondisi alam, dan cara pengamalannya.¹² Sementara Agus Sunyoto melihat Islam Nusantara merupakan praktik keagamaan masyarakat di Nusantara yang berhubungan dengan dakwah yang dilakukan Wali Songo.¹³

Substansi konsep Islam Nusantara yang disampaikan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama pada dasarnya merupakan sebuah upaya ulama NU untuk mengcounter ideologi trans nasional: terorisme, ekstrimisme, radikalisme yang sudah sangat marak dan mulai memiliki banyak pengikutnya di Indonesia. Tujuan dari gerakan Islam konservatif tersebut adalah untuk mendirikan negara Islam sebagaimana diperjuangkan ISIS/NIIS; konsep Khilafah Islamiyah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI); dan NKRI Bersyari'ah yang diperjuangkan Habib Rizieq Shihab melalui Front Pembela Islam (FPI). Konsep Islam Nusantara merupakan ijtihad ulama NU untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana disampaikan KH. Husein

¹⁰Afifuddin Muhajir, "Maksud dan Istilah Islam Nusantara" dalam Abi Attabi (Penyusun), *Antologi Islam Nusantara: di Mata Kyai, Habib, Santri dan Akademisi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hal. 6.

¹¹Abdul Moqsith Ghazali, "Metodologi Islam Nusantara" dalam Abi Attabi, *Antologi Islam*, hal. 79.

¹²Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia*, Dialog-dialog Santri-Kiai tentang Studi Islam dan Kajian ke-Indonesiaan dari PBNU (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) untuk Dunia (Jakarta: Pustaka Afid Jakarta, 2015).

¹³Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah* (Jakarta: IIMan dan LESBUMI PBNU, 2018), hal.450.

Muhammad¹⁴ bahwa kehadiran Islam Nusantara merupakan komitmen kaum santri melawan radikalisme yang akan menghancurkan Republik Indonesia.

D. Wacana Agama dan Politik di Indonesia

Isu agama sangat sensitif ketika dibawa ke dunia politik. Namun, di sisi lain, isu agama memiliki daya jual untuk memperoleh kemenangan sebuah kontestasi politik. Politisasi agama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 telah menampakkan kesuksesannya, sehingga menginspirasi para politisi di daerah untuk menggunakan strategi politik identitas. Kesuksesan politisasi agama salah satunya juga diterapkan pada pemilihan gubernur di Sumatera Utara, yang dalam kampanyenya menggunakan sentimen keagamaan dengan banyaknya apel massa yang mengundang ustad terkenal, seperti Ustad Abdul Somad dan Tengku Zulkarnain yang dikenal kritis terhadap Pemerintah dan juga merupakan alumni Aksi Bela Islam 212.

Aksi Bela Islam yang kemudian dikenal dengan Aksi Bela Islam 212 telah banyak mendapat perhatian para peneliti agama, sosial dan politik. Banyak seminar, jurnal, dan buku yang mengulas peristiwa politik ini. Di antaranya Indoprogress menurunkan antologi tulisan, "Bela Islam atau Bela Oligarki"¹⁵ yang mengupas Aksi Bela Islam tidak dapat terlepas dari politik dan peran kaum oligarki. Selain itu Indoprogress juga menerbitkan buku, "Kebangkitan Populisme Islam di Indonesia: Sebuah Perdebatan."¹⁶ Buku ini menyorot isu populisme sebenarnya tidak mengakar karena tidak dibangun secara sistemik, jika ramainya populisme, hal itu dikarenakan sedang adanya kontestasi politik antar elite, yang walaupun akan merugikan dengan ancaman perang saudara, namun hal tersebut menguntungkan kaum elit tersebut.

Jurnal Ma'arif Vol. 11. No 2 – Desember 2016 menurunkan tema khusus "Setelah 'Bela Islam': Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial" yang memuat artikel-artikel: Aksi Bela Islam: *Konservatisme dan Fragmentasi*

¹⁴Husein Muhammad, "Pesantren, NU dan Islam Nusantara", hlm.

¹⁵Dede Mulanto (Ed), *Bela Islam atau Bela Oligarki: Pertalian Agama, Politik dan Kapitalisme di Indonesia* (Jakarta: Indoprogress, 2017).

¹⁶Ari A. Perdana, dkk, *Kebangkitan Populisme Islam di Indonesia: Sebuah Perdebatan* (Jakarta: Indoprogress, 2018).

Otoritas Keagamaan (Ahmad Najib Burhani); *Aksi Bela Islam, Akankah Mengubah Lanskah Muslim Indonesia?* (Mohammad Iqbal Ahnaf); *Aksi Bela Islam, Populisme Konservatif dan Kekuasaan Oligarki* (Airlangga Pribadi Kusman); *Ekonomi Politik Aksi Bela Islam: Pluralisme dalam Krisis?* (Rizky Aliv Alvian); *Keadilan Semu Penodaan Agama: Aksi Bela Islam, Ruang Publik dan Dilema Negara Hukum Demokratis* (Fiqh Vredian Aulia Ali); *MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang* (Moch. Nur Ichwan); *Quo Vadis FPI dalam Aksi Bela Islam* (Mark Woodward & Amanah Nurish); *Ummat, Warga dan Ruang Kosong Pelayanan Dasar* (Abdul Gafar Karim & Longgina Novandona Bayo); *Muhammadiyah dan Aksi Bela Islam: Rejuvenasi Politik Umat Islam?* (Zuly Qodir); *Kematian Gus Dur dan Lahirnya Habitus Baru Kebhinekaan Indonesia* (Ahmad Suaedy); *Perempuan dan Media dalam Aksi “Bela Islam”* (Alimatul Qibtiyah); *Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia* (Muhammad Wildan); *Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial Pasca “Aksi Bela Islam” 2016* (Hilman Latief). Seluruh artikel dalam Jurnal Maarif ini menggunakan “Aksi Bela Islam” yang ditulis dalam tanda kutip yang dapat dimaknai bahwa “Aksi Bela Islam” bukanlah sebuah perjuangan otentik Membela Islam, melainkan terdapat banyak kepentingan dalam massa aksi tersebut. Banyaknya kajian akademis mengenai Aksi Bela Islam merupakan sebuah bukti bahwa aksi massa Islam tersebut membuktikan apa yang dikatakan Martin Van Bruinessen¹⁷ sebagai *Conservative Turn*.

Pemilihan Presiden RI tahun 2014 merupakan pemilihan presiden yang paling memiliki efek negatif sepanjang sejarah pemilihan presiden Indonesia. Pasca pemilihan presiden 2014 banyak para ahli menyimpulkan bahwa momen politik 2014 ini telah membelah masyarakat Indonesia: Pro Joko Widodo dan Pro Prabowo Subianto. Lebih parah lagi pembelahan tersebut mengarah kepada stigma Pro Islam dan Anti Islam yang berikutnya menjadi propaganda untuk pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019.

¹⁷Martin van Bruinessen (Ed), *Contemporary Developments in Indonesian Islam Explaining the ‘Conservative Turn’* (Singapore: ISEAS, 2013)

Aroma konflik pemilihan presiden 2014 muncul kembali di pemilihan Gubernur DKI Jakarta di tahun 2016. Basuki Tjahya Purnama yang non muslim diidentikkan dengan Presiden RI, Joko Widodo. Sehingga kasus demonstrasi Aksi Bela Islam, karena penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok dipandang sebagai sebuah gerakan yang berupaya menjatuhkan Joko Widodo. Hingga sepanjang Aksi Bela Islam yang dilakukan berjilid-jilid tersebut bersamaan dengan munculnya isu makar yang menyebabkan beberapa tokoh oposisi seperti Sri Bintang Pamungkas, Ahmad Dhani, Kivlan Zen dan tokoh lainnya ditangkap karena dianggap akan melakukan aksi Makar.

Isu-isu suku agama ras dan antar golongan (SARA) pasca Aksi Bela Islam semakin menguat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dianggap oleh Alumni 212 sebagai rezim yang anti Islam. Sehingga setiap manuver dan kebijakan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dianggap tidak berpihak kepada umat Islam, di antar kebijakan tersebut: Sertifikasi da'i; Kriminalisasi ulama; *Full Day School*. Isu-isu tersebut dipropaganda oleh kelompok Islamis untuk mencitrakan Presiden Jokowi tidak aspiratif dan tidak mengakomodir kelompok Islam.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo melakukan manuver politik dengan merangkul kalangan Nahdlatul Ulama dengan berbagai kegiatan dan program, di antaranya: Penetapan Hari Santri, Kunjungan yang intens ke pesantren, Penetapan Titik Nol Islam Nusantara di Barus, Tradisi Zikir 1 Agustus di Istana bersama ulama NU, dan puncaknya adalah pemilihan Rais Am Nahdlatul Ulama, KH. Ma'ruf Amin menjadi calon wakil presiden. Presiden Joko Widodo terkesan lebih berpihak kepada Nahdlatul Ulama, dan menimbulkan kritik bahwa Presiden Joko Widodo jangan hanya merapat ke Nahdlatul Ulama, tetapi mengabaikan kelompok Islam yang dianggap bersebrangan dengan Pemerintah. Akomodasi pemerintah terhadap konsep Islam Nusantara yang juga memunculkan polemik adalah ketika peringatan Isra' Mi'raj tanggal 15/5 di Istana dimulai dengan pembacaan Al-Qur'an dengan langgam Jawa, oleh Syaiful Arif¹⁸ ini dipandang menguatkan tuduhan bahwa Islam Nusantara adalah upaya Jawanisasi.

¹⁸Syaiful Arif, "Kesalahpahaman Islam Nusantara" dalam Abi Attabi', *Antologi Islam Nusantara*, hlm. 59.

Negara selalu berupaya melakukan hegemoni kelompok-kelompok agama dengan berbagai bentuk. Studi Moch. Nur Ichwan¹⁹ memperlihatkan adanya politik penerjemahan kitab suci yang mengakomodir kekuasaan. Dalam konteks konsep Islam Nusantara yang digagas oleh NU langsung mendapat dukungan dari Pemerintah, karena apa yang ditawarkan NU dengan konsep Islam Nusantara dianggap sejalan dengan Pemerintah untuk dapat meredam ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.

Dalam catatan sejarah, NU selalu memiliki sikap moderat dan berada di garis terdepan menjaga NKRI, hingga dalam momen demonstrasi Aksi Bela Islam, secara resmi PBNU menyatakan tidak mendukung aksi massa tersebut, namun demikian juga banyak kalangan *nahdliyin* juga terlibat dalam Aksi Bela Islam. Kebijakan PBNU tersebut dianggap oleh kalangan yang tergabung dalam Aksi Bela Islam sebagai ketidakberpihakan kepada perjuangan umat Islam. Sehingga pada berikutnya apa saja yang dilakukan oleh PBNU dan badan-badan otonomnya sering mendapat serangan dan *bully* di media sosial. Misalnya Ansor dan Banser yang dianggap hanya menjaga gereja namun membubarkan pengajian. Momentum menjatuhkan Banser terjadi ketika terjadi peristiwa pembakaran bendera HTI pada perayaan Hari Santri Nasional di Garut. Aksi pembakaran bendera HTI ini memunculkan gejolak sosial yang kemudian memunculkan kembali aksi yang dinamai Aksi Bela Tauhid dengan tuntutan bubarkan Ansor Banser dan bahkan mengarah kepada bubarkan NU. Selain itu juga muncul tuduhan kepada KH. Said Aqil Siraj adalah seorang pengikut Syi'ah, dan tentu saja konsep Islam Nusantara adalah sasaran utama kelompok Islamis yang juga bersikap oposan kepada pemerintah tersebut menyerang NU. Dalam berbagai propaganda sering disampaikan bahwa Pemerintah selalu mendukung NU yang sering bersebrangan dengan kelompok Islamis.

¹⁹Moch. Nur Ichwan, "Negara, Kitab Suci dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia", dalam Henri Chambert-Loir, *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: KPG, 2009), hlm. 429.

E. Resistensi terhadap Konsep Islam Nusantara

Awal munculnya konsep Islam Nusantara ketika Mukhtamar NU sempat memunculkan banyak reaksi. Namun pada tahun 2015 tersebut belum muncul kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok), dan belum terdapat sebuah kontestasi politik yang mendapatkan perhatian secara nasional. Sehingga diskursus Islam Nusantara tidak begitu dikapitalisir sebagai wacana keagamaan yang bermanfaat untuk modal politik. Polemik Islam Nusantara kembali muncul ketika beberapa penda'i dalam ceramah-ceramahnya mengkritik konsep Islam Nusantara, seperti yang dilakukan oleh seorang ustadzah terkenal, Mama Dedeh, yang mengatakan kepada peserta lomba ceramah untuk mencoret Islam Nusantara. Pernyataan Mama Dedeh ini mendapat banyak respon pro dan kontra. Namun kemudian Mama Dedeh menyatakan pernyataan permohonan maaf akan pernyataan tersebut.

Kasus pernyataan “coret Islam Nusantara” Mama Dedeh ini kemudian memunculkan babak baru polemik mengenai konsep Islam Nusantara. Media sosial, dan Media *Online* diramaikan dengan berita dan diskusi Islam Nusantara. Di *Facebook* dan *Twitter* para *netizen* melakukan perdebatan kusir mengenai Islam Nusantara. Sedangkan media-media *online* yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama secara intens dan massif menyebarkan konten Islam Nusantara. Sebaliknya media *online* yang kontra terhadap Islam Nusantara juga publikasi artikel maupun berita yang berupaya memojokkan konsep Islam Nusantara. Penggunaan media sosial dan media *online* sebagai media perang wacana membuatnya secara mudah menyebar, sehingga menjadi pembahasan publik. Polemik terjadi di lingkungan kaum akademisi hingga masyarakat umum, berbagai perdebatan keras terjadi, namun tidak banyak yang memahami apa sebenarnya konsep Islam Nusantara. Dari polemik alam maya kemudian diskursus berlangsung di alam nyata, muncul gerakan-gerakan yang mengkritik konsep Islam Nusantara bersamaan dengan gerakan ganti Presiden seperti yang dilakukan di #2019GantiPresiden yang selalu menggunakan isu dan wacana keagamaan bersamaan dengan sosialisasi gerakan mengganti Presiden. Di beberapa tempat bahkan kelompok #2019GantiPresiden menuduh badan otonom NU, Banser telah menghambat gerakan mereka, seperti di

Jawa Barat,²⁰ di Semarang sempat terjadi penolakan kehadiran Ustadz Abdul Somad, dikenal sebagai ulama pendukung Aksi Bela Islam yang dalam Ijtima' Ulama direkomendasikan sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo, Banser dituduh dibalik aksi penolakan ceramah Ustadz Abdul Somad,²¹ aksi penolakan #2019GantiPresiden di Batam, FPI menuduh Banser dan Projo dituduh sebagai pelaksana demonstrasi penolakan kehadiran aktivis 2019GantiPresiden, Neno Warisman.²² Di kasus deklarasi #2019GantiPresiden di Makassar, badan otonom NU, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga melakukan aksi demonstrasi menolak Neno Warisman hadir di Makassar.²³ Peristiwa-peristiwa tersebut menampakkan “framing” Banser menolak gerakan politik ganti presiden yang sering diisi dengan muatan agama.

Resistensi terhadap konsep Islam Nusantara semakin menampakkan perang ideologis dan politik ketika Majelis Ulama Islam (MUI) Sumatera Barat mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap konsep Islam Nusantara tidak dibutuhkan di ranah Minang (Sumatera Barat).²⁴ Penolakan MUI Sumbar ini kemudian memunculkan polemik baru dengan MUI Pusat. Pasca peristiwa pembakaran bendera HTI, di Sumatera Barat juga terjadi persekusi terhadap anggota Banser yang memaksa anggotanya untuk keluar dan “tobat” dari ajaran Islam Nusantara yang dianggap mereka ajaran sesat.

Kelompok Islamis mendukung sikap Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat yang menolak konsep Islam Nusantara. Mengenai ini disampaikan oleh ustad-ustad kontra konsep Islam Nusantara dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya mimbar khutbah Jumat. Ustad menyampaikan kepada jamaah Jum'at bahwa Islam Nusantara merupakan ajaran sesat yang didukung oleh

²⁰“Banser Jabar Minta Bawaslu Hentikan Kampanye 2019 Ganti Presiden”, liputan6.com, 03 Agustus 2018, diakses tanggal 06 Agustus 2018.

²¹(1) “Gus Nuril dan Pasukannya Siap Gagal Ustadz Somad di Semarang”, <https://suaranasional.com>, 26 Juli 2018; (2) Banser Kota Semarang Ikut Tolak Ustadz Abdul Somad, <https://suaranasional.com>, 27 Juli 2018, diakses tanggal 06 Agustus 2018.

²²“Voa Islam Fitnah Banser Soal Penghadangan Neno Warisman di Batam”, <https://arrahmahnews.com>, 29 Juli 2018, diakses tanggal 06 Juli 2018.

²³“PMII Tolak Neno Warisman ke Makassar: Jika Nekat Datang, Kami Adang di Bandara”, Merdeka.com, 07 Agustus 2018, diakses 07 Agustus 2018,

²⁴“MUI Sumatera Barat Tolak ‘Islam Nusantara’”, <https://m.detik.com>, Rabu 25 Juli 2018, diakses tanggal 06 Agustus 2018.

kelompok pembela penista agama, dalam hal ini adalah Ahok. Ustad tersebut juga menyebut beberapa tokoh NU yang dituduhnya sebagai penganut Syi'ah seperti KH.Said Aqil Siradj, Menteri Agama, Lukmanul Hakim, Politisi PPP, Romahurmuzy. Ustad tersebut menyebut bahwa Pemerintahan Jokowi harus membubarkan Islam Nusantara.

Sikap MUI Sumbar ini memicu kelompok Islamis agar pihak MUI di daerah masing-masing mengikuti apa yang dilakukan oleh MUI Sumbar. Di Jambi organisasi Aliansi Umat Islam melakukan rapat-rapat, salah satunya di Mesjid Nurdin Hasanah untuk melakukan aksi menolak Islam Nusantara.²⁵ Cikal bakal Aliansi Umat Islam Jambi diulai dari Aksi Bela Islam, AUI Jambi ini terdiri dari Muhammadiyah, KAMMI, HMI, IPI, KAHMI, IMM, Masyarakat Seberang.²⁶ Dalam pemberitaan media *online*, AUI Jambi pernah melakukan aksi-aksi di antaranya: Aksi Bela Islam; Aksi Bela Habib Rizieq dan FPI; Demonstrasi Penistaan agama Hotel Novita.

Aliansi Umat Islam Jambi memasang spanduk-spanduk di pinggir jalan Kota Jambi yang isinya, “Aliansi Umat Islam Jambi Menolak Konsep Islam Nusantara: (1) AUI Jambi mendukung 7 pernyataan Majelis Ulama Indonesia (KUI) Sumatera Barat; (2) Mendesak MUI Jambi menolak Islam Nusantara secara tegas di bumi Jambi; (3) Masyarakat Jambi tidak berbeda dengan masyarakat Sumbar,” adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah” sesuai dengan masyarakat Melayu di Provinsi Jambi; (4) Islam itu cakupannya lebih luas bukan hanya di Nusantara, jadi dengan adanya penyebutan Islam Nusantara mengecilkan Islam itu sendiri, seolah2 Itu hanya ada di Nusantara.”²⁷ Abdul Hamid Harwindo, Wakil Ketua Umum AUI Kota Jambi menyatakan konsep Islam Nusantara akan mengkotak-kotakkan Islam yang pada dasarnya tidak ada Islam Arab dan Islam Nusantara.²⁸ Bagi AUI Jambi hanya ada satu Islam.²⁹ Oleh karena itu AUI Jambi

²⁵ABD, wawancara, 5 Agustus 2018.

²⁶“Aliansi Umat Islam Jambi Dukung Habib Rizieq” BeritaJambi.co, Jum’at, 03 Februari 2017.Diakses tanggal 5 Agustus 2018.

²⁷Observasi Spanduk Aliansi Umat Islam Jambi, Provinsi Jambi, bulan Agustus 2018.

²⁸“Komentari Soal Islam Nusantara, AUI Jambi: Kami Sepakat dengan MUIN Sumbar” jambiberita.com, Jum’at, 03 Agustus 2018, dakses 05 Agustus 2018.

mendukung MUI Jambi untuk mengikuti apa yang telah dilakukan MUI Sumbar dengan menolak konsep Islam Nusantara.

Aliansi Umat Islam Jambi merupakan elemen gabungan organisasi Islam yang ada di Provinsi Jambi yang ketika kasus Ahok juga melakukan aksi-aksi demonstrasi berjilid-jilid di Tugu Juang Kota Jambi.

Penolakan-penolakan yang dilakukan terhadap konsep Islam Nusantara jika disederhanakan dapat dikatakan bahwa Islam adalah satu, tidak diperlukan territorial dalam penamaan Islam. Serta pelabelan dan kampanye konsep Islam Nusantara merupakan Islam yang damai dianggap mendiskreditkan Islam di Timur Tengah dan dikesankan anti Arab. Pada dasarnya kalangan NU sangat menyadari bahwa amaliyah nahdliyin, misalnya ziarah kubur selalu menjadi sasaran kelompok Islam Modernis dengan menuduh apa yang dilakukan adalah takhayaul, bid'ah, dan khurafat.³⁰ Said Aqil Siradj menyayangkan kalangan ilmuwan sosial positivis yang mengkategorikan Islam Nusantara sebagai Islam sinkretis, asimilatif, semi animis, dan tradisional.

Resistensi kalangan Islamis di berbagai daerah tersebut mendapat respon Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Sikap MUI Sumbar mendapat tanggapan dari Ketua MUI Pusat, KH. Ma'ruf Amin yang akan meluruskan, dan menjelaskan bahwa MUI tidak boleh mencela salah satu aliran, karena Islam Nusantara tidak menyimpang.³¹

Ketua PBNU, Marsudi Syuhud menilai MUI Sumbar telah gagal memahami Islam Nusantara dengan mengatakan Islam Nusantara seperti agama baru.³² Marsudi Syuhud menyebut bahwa penerapan adat di Sumbar sendiri adalah bagian dari Islam Nusantara.

²⁹,"Tolak Konsep Islam Nusantara, AUI Jambi: Islam itu Satu" Kajanglako.com, 03 Agustus 2018, diakses 05 Agustus 2018.

³⁰Said Aqil Siraj,"Kata Pengantar: Meneladani Strategi "Kebudayaan" Para Wali" dalam Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah* (Jakarta: IIMan dan LESBUMI PBNU, 2018),hlm. xiii.

³¹,"Ma'ruf Amin Akan Luruskan MUI Sumbar soal Islam Nusantara" <https://m.cnnindonesia.com>, 26 Agustus 2018, diakses tanggal 05 Agustus 2018.

³²,"PBNU Seut MUI Sumbar Gagal Paham Soal Islam Nusantara" <https://m.cnnindonesia.com>, 27 Juli 2018, diakses tanggal 5 Agustus 2018.

Pertanyaan penting mengenai polemik konsep Islam Nusantara adalah mengapa ketika Nahdlatul Ulama mengeluarkan konsep tersebut mendapat hujatan dari kaum konservatif Islam? padahal dalam dunia akademik sebuah labeling sebuah teori merupakan hal biasa bahkan diharuskan untuk mempermudah mengenal sebuah konsep. Dalam kajian akademik studi Islam banyak konsep-konsep telah dirumuskan para ahli, di antaranya: KH. Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam sering juga gagasannya disebut dengan Islam Substantif; Azyumardi Azra pernah menulis buku, Islam Nusantara; Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif; Nurcholish Madjid, Islam Inklusif; Ulil Abshar Abdalla dengan Jaringan Islam Liberalnya; Kuntowijoyo, Islam Profetik; Hasan Hanafi, Islam Kiri; Alshgar Engineer, Islam Pembebasan. Labelling Islam tersebut merupakan sebuah tema yang ditekankan untuk perlu dilakukan dalam sebuah isu, sehingga Islam dapat dilihat dari berbagai aspek secara mendalam dan saling mengisi dari konsep yang dikemukakan. Sebagaimana Muhammadiyah dengan konsep Islam Berkemajuan, maka Nahdlatul Ulama dengan Islam Nusantara adalah sebuah tema Muktamar untuk menyikapi sebuah fenomena global dan nasional, dan tentunya untuk Muktamar berikutnya bisa jadi akan diusung sebuah konsep Islam yang lain, lalu apakah setiap tema tersebut dipolemikkan dan dibawa ke ranah politik.

Propaganda dan *framing* mengenai diskursus Islam Nusantara tidak lagi murni perdebatan wacana keagamaan, melainkan sudah mengarah ke politik praktis pemilihan Presiden RI 2019 dimana terdapat dua pasangan calon: Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin serta pasangan Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Joko Widodo yang berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin yang merupakan tokoh dan kiyai Nahdlatul Ulama menjadi sasaran serangan dengan menggunakan konsep Islam Nusantara sebagai sebuah ajaran yang sesat dan seolah Joko Widodo sebagai *incumbent* telah mendukung ajaran yang merusak kemurnian Islam. Polemik dan diskursus *black campaign* konsep Islam Nusantara dilakukan untuk merusak citra pemerintahan Joko Widodo yang diharapkan akan memengaruhi berkurangnya dukungan dari kalangan umat Islam. Sebagaimana kesuksesan penggunaan isu keagamaan pada Pilkada Jakarta yang mengalahkan

dan bahkan memenjarakan Basuki Thajaya Purnama maka penggunaan polemik konsep Islam Nusantara juga meraih kesuksesan politik elektoral.

F. Penutup

Polemik konsep Islam Nusantara merupakan kesatuan rangkaian peristiwa politik di Indonesia yang telah dimulai dari Pemilihan Presiden tahun 2014; Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2016; kemudian konsep Islam Nusantara menjadi wacana keagamaan yang diproduksi untuk agenda Pemilihan Presiden di Tahun 2019. Dukungan Pemerintahan Joko Widodo terhadap konsep Islam Nusantara karena dianggap sebagai *counter* ideologi terhadap Islam politik transnasional dan kelompok Islam konservatif yang mendapatkan momentum pasca Aksi Bela Islam yang mendapatkan simpati sebagian umat Islam. Diskursus Islam Nusantara kemudian dikapitalisir dan dipolitisir sebagai bahan *black campaign*, terlebih lagi Joko Widodo sebagai petahana memilih KH. Ma'ruf Amin, seorang Rais Am Nahdlatul Ulama sebagai calon wakil presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf, "Khitah Islam Nusantara", Kompas, 29 Agustus 2015.
- Baso, Ahmad, *Islam Nusantara* (Jakarta, 2015); 2) Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo*, Jakarta, IMan dan Lesbumi PBNU, 2018.
- Baso, Ahmad, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia*, Dialog-dialog Santri-Kiai tentang Studi Islam dan Kajian ke-Indonesiaan dari PBNU (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945) untuk Dunia, Jakarta: Pustaka Afid Jakarta, 2015.
- Bruinessen, van, Martin (Ed), *Contemporary Developments in Indonesian Islam Explaining the 'Conservative Turn'*, Singapore: ISEAS, 2013.
- Ichwan, Moch, Nur, "Negara, Kitab Suci dan Politik: Terjemah Resmi Al-Qur'an di Indonesia", dalam Henri Chambert-Loir, *Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: KPG, 2009).
- Mulyanto, Dede (Ed), *Bela Islam atau Bela Oligarki: Pertalian Agama, Politik dan Kapitalisme di Indonesia*, Jakarta: Indoprogress, 2017.
- Muhajir, Afifuddin, "Maksud dan Istilah Islam Nusantara" dalam Abi Attabi (Penyusun), *Antologi Islam Nusantara: di Mata Kyai, Habib, Santri dan Akademisi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Nurcholish, Masalah Tradisi dan Inovasi Keislaman dalam Bidang Pemikiran: serta tantangan dan harapannya di Indonesia" dalam Yustiono, dkk, *Islam dan Kebudayaan Indonesia: Dulu, Kini dan Esok*, Jakarta: Yaysan Festival Istiqlal, 1993.
- Wahid, Abdurrahman, *Pribumisasi Islam* (Jakarta: P3M).
- Perdana, A, Ari, dkk, *Kebangkitan Populisme Islam di Indonesia: Sebuah Perdebatan*", Jakarta: Indoprogress, 2018.
- Sahal, Akhmad dan Munawir Aziz (Ed), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqih hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan, 2016.
- Siraj, Aqil, Said, "Kata Pengantar: Meneladani Strategi "Kebudayaan" Para Wali" dalam Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah*, Jakarta: IMan dan LESBUMI PBNU, 2018.
- Sunyoto, Agus, *Atlas Wali Songo: Buku Pertama yang Mengungkap Wali Songo sebagai Fakta Sejarah*, Jakarta: IMan dan LESBUMI PBNU, 2018.

Website

- "Ini Tema Muktamar NU ke-33 di Jombang" www.nu.or.id, Senin 09 Maret 2015, diakses tanggal 05 Agustus 2018.
- "Presiden Jokowi Apresiasi Tema Muktamar ke-33 NU 'Islam Nusantara'", <https://m.detik.com>, 01 Agustus 2015, diakses tanggal 05 Agustus 2018.
- "Ini Tema Muktamar NU ke-33 di Jombang" www.nu.or.id, Senin 09 Maret 2015, diakses tanggal 05 Agustus 2018.
- "Banser Jabar Minta Bawaslu Hentikan Kampanye 2019 Ganti Presiden", liputan6.com, 03 Agustus 2018, diakses tanggal 06 Agustus 2018.
- "Gus Nuril dan Pasukannya Siap Gagalakan Ustadz Somad di Semarang", <https://suaranasional.com>, 26 Juli 2018; (2) Banser Kota Semarang Ikut

- Tolak Ustadz Abdul Somad, <https://suaranasional.com>, 27 Juli 2018, diakses tanggal 06 Agustus 2018.
- “Voa Islam Fitnah Banser Soal Penghadangan Neno Warisman di Batam”, <https://arrahmahnews.com>, 29 Juli 2018, diakses tanggal 06 Juli 2018.
- “PMII Tolak Neno Warisman ke Makassar: Jika Nekat Datang, Kami Adang di Bandara”, Merdeka.com, 07 Agustus 2018, diakses 07 Agustus 2018.
- “MUI Sumatera Barat Tolak ‘Islam Nusantara’”, <https://m.detik.com>, Rabu 25 Juli 2018, diakses tanggal 06 Agustus 2018.
- “Aliansi Umat Islam Jambi Dukung Habib Rizieq” BeritaJambi.co, Jum’at, 03 Februari 2017. Diakses tanggal 5 Agustus 2018.
- “Komentari Soal Islam Nusantara, AUI Jambi: Kami Sepakat dengan MUI Sumbar” jambiberita.com, Jum’at, 03 Agustus 2018, diakses 05 Agustus 2018.
- “Tolak Konsep Islam Nusantara, AUI Jambi: Islam itu Satu” Kajanglako.com, 03 Agustus 2018, diakses 05 Agustus 2018.
- “Ma’ruf Amin Akan Luruskan MUI Sumbar soal Islam Nusantara” <https://m.cnnindonesia.com>, 26 Agustus 2018, diakses tanggal 05 Agustus 2018.
- “PBNU Seut MUI Sumbar Gagal Paham Soal Islam Nusantara” <https://m.cnnindonesia.com>, 27 Juli 2018, diakses tanggal 5 Agustus 2018.